

# BAHASA MADURA SEBAGAI BAHASA RESMI REGIONAL (Sebuah Ikhtiar Alternatif Pemeliharaan Bahasa)

Mulyadi

(Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan dan alumni program Master Pendidikan Bahasa Universitas Islam Malang)

## **Abstrak:**

Tulisan ini bertitik tolak dari realitas bahwa sebuah bahasa harus mengalami proses kenaikan status (*elitisasi*) sebagai salah satu usaha alternatif agar bahasa itu tetap bertahan dan terpelihara. Saat ini, kondisi tersebut sedang menggelayuti bahasa Madura yang terancam terasing di tanah kelahiran sendiri. Dengan antisipasi historis, yakni pengalihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang selanjutnya menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi, serta kalkulasi modalitas serta potensi yang dimiliki oleh bahasa Madura, bahasa ini berpotensi untuk menjadi bahasa resmi regional (skala wilayah penutur bahasa Madura). Tentu saja usaha ini tidak untuk merusak tatanan yang sudah dianggap mapan terhadap kenyamanan status bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi satu-satunya di negeri ini, tetapi lebih kepada usaha penguatan wawasan kebangsaan di ranah linguistika belaka.

## **Kata kunci:**

*bahasa nasional, bahasa resmi, perencanaan/rekayasa bahasa*

## **Pendahuluan**

Fakta bahwa Indonesia adalah negara besar sulit diabaikan. Negara ini tidak hanya besar dari tinjauan wilayah yang mencapai luas satu juta sembilan ratus enam ribu dua ratus empat puluh kilo meter (1.906.240 km), atau berada di peringkat lima belas negara terbesar di antara ratusan negara di dunia, tetapi Indonesia juga besar dari perspektif kekayaan etnis, kuantitas budaya, jumlah kesenian dan ragam perbendaharaan

bahasa. Karena keragaman bahasanya, negara seperti Indonesia, Filipina, negara Han disebut sebagai negara multibahasa (*multilingual countries*).<sup>1</sup>

Keanekaragaman bahasa ini kerap memberi keuntungan, tetapi tidak jarang

---

<sup>1</sup>Periksa Janet Holmes, *An Introduction to Sociolinguistics*. (London: Longman, 2001) hlm. 101. Dalam kajian Sociolinguistik, istilah Negara multi-bahasa disebut juga dengan Negara *aneka bahasa* yang ditandingkan dengan istilah Negara *eka-bahasa* (*monolingual country*).

menyulitkan sebuah negara. Salah satu kendala yang dihadapi oleh negara aneka bahasa adalah dalam memilih bahasa persatuannya (*national language*), seperti yang dialami oleh negara Tanzania yang memiliki banyak ragam bahasa, di mana akhirnya memilih Swahili sebagai bahasa resmi sebagai antisipasi politik dan linguistik.

Dalam konteks Negara Indonesia, pemilihan bahasa Melayu di antara ratusan bahasa yang dituturkan di Indonesia tentu saja melalui proses yang kompleks, di mana akibat dari pemilihan tersebut (meskipun sudah final dari kerangka perundang-undangan) masih banyak diperdebatkan, baik dari kajian sejarah politik maupun dari kajian Linguistik. Dengan jargon politik *one nation one language*, para *founding parents* memilih bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Dari kerangka historis, pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah mengapa bahasa Melayu yang 'diminati' atau dipilih oleh para aktivis nasional saat itu sebagai bahasa Indonesia, yang kemudian disumpahkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928<sup>2</sup>? Secara lebih rinci, nantinya akan dideskripsikan tentang misteri pengalihan dari bahasa Melayu sebagai bahasa Nasional.

Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia atau bahasa nasional telah mengancam eksistensi bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah konsekuensi sebutan bahasa nasional bagi bahasa Indonesia, bahasa ini -paling tidak- (kala itu masih bernama bahasa Melayu) harus mampu melintasi batas *isogloss* Indonesia raya bagaimanapun caranya, seperti 'memaksakan' bahasa itu di

diucapkan di forum-forum resmi, baik secara tulis ataupun lisan. Dampaknya, banyak bahasa daerah, baik dengan jumlah penutur yang besar maupun kecil, harus rela berbagi penutur, atau bahkan melepaskan mereka menjadi penutur bahasa Indonesia.

Masalah ini mungkin tidak terpikirkan oleh para pendiri bangsa saat itu, karena pemilihan sebuah bahasa nasional sebuah bangsa sangat murni bermotif politis daripada berlatar antisipasi kepentingan linguistik.<sup>3</sup> Seperti kebanyakan negara aneka bahasa lainnya, pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia bertitik tolak dari dalih penyatuan bangsa yang memiliki aneka ragam bahasa. Situasi politik saat itu sungguh sangat menguntungkan bagi bahasa Melayu, karena dibanding dengan bahasa daerah lainnya---yaitu Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Madura dan lain-lain, bahasa ini lebih dianggap lebih nonpresentatif dari sudut pandang asal daerah para tokoh perjuangan saat itu; yaitu untuk melawan bahasa kolonial dengan menciptakan (meresmikan) bahasa nasional. Dengan kata lain, pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia lebih bersifat netral kepentingan (pragmatik), meskipun tidak semua penutur bahasa daerah lain paham dan mengerti bahasa Melayu.

Namun kalkulasi politis-pragmatis ini sungguh berdampak luas pada pemertahanan bahasa daerah di masa-masa selanjutnya (pasca perjuangan). Akibat gencarnya propaganda-propaganda penggunaan bahasa Indonesia, sejak era orde lama hingga jaman orde baru seperti, dikotomi bahasa kolonial-nasional, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa menunjukkan bangsa, dll., banyak bahasa daerah yang kehilangan penutur aslinya, bukan karena migrasi atau *force*

<sup>2</sup>Soedjatmoko, "Bahasa dan Transformasi Bangsa", dalam *Bahasa dan Kekuasaan- Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, ed. Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (Bandung: Mizan, 1996) hlm. 173-174.

<sup>3</sup>Sumarsono dan Paina Partana, *Sosiolinguistik*. (Yogyakarta: Sabda dan Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 174..

*major*, tetapi karena mereka telah menjadi *dwibahasawan/bilingualist*.

Dalam konteks bahasa Madura, kedwibahasaan sungguh tidak menguntungkan, karena kondisi yang tidak berkeadilan, di mana bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional dan intensitas seruan pemakaiannya terus menerus digaungkan melalui ranah politik dan pendidikan. Sedangkan bahasa Madura hanya berstatus bahasa daerah yang tidak bermodal politik dan hanya berbekal penutur warisan yang berpotensi semakin berkurang. Kondisi lain adalah dampak logis dari kondisi pertama, yaitu munculnya *inferiority complex*, di mana manusia Madura lebih memilih berbahasa Indonesia hanya karena ingin dianggap nasionalis, bahkan modern daripada memakai bahasa mereka sendiri. Kondisi ini memunculkan penyebutan *substratum language* dan *superstratum language*.<sup>4</sup> Kondisi serupa pasti akan menjangkiti bahasa daerah lainnya. Kalau kondisi seperti ini tetap bertahan, sungguh ini akan menjadi tragedi bahasa yang amat memilukan, di mana bahasa daerah akan mati akibat berondongan propaganda bahasa nasional.

Agar tragedi bahasa itu tidak terjadi, maka perlu dilakukan ikhtiar bersama antara pemerintah sebagai pemilik bahasa nasional dengan komunitas penutur bahasa daerah, dalam hal ini Madura (kalau memang elit daerah atau lokal masih tertunduk tidak berdaya terhadap pemerintah pusat) untuk membincang usaha pemertahanan bahasa daerah agar tidak tergerus bahasa nasionalnya sendiri. Penulis mencoba untuk mengajukan gagasan dalam tulisan ini agar bahasa Madura dijadikan

<sup>4</sup>Kondisi di mana penutur asli sebuah bahasa yang memandang bahasanya kurang *prestige* dibanding dengan bahasa baru yang dia pelajari. Baca Stefanie Jennedy, et al., *Language File* (Columbus: Ohio State University, 1994) hlm. 349.

Bahasa Resmi regional dengan alasan yang akan dipeberkan pada bagian selanjutnya.

### **Pengalihan Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia**

Pada awalnya, proses pengalihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia bukan dilandasi pada perbedaan teknis bahasa (struktur maupun perbendaharaan), tetapi semata karena cita-cita persatuan politik.<sup>5</sup> Dalihnya, yaitu bahwa bahasa Melayu sebelumnya sudah dikenal luas dalam dunia perdagangan dan dianggap berkembang di wilayah semenanjung Melayu, Sumatra dan Kalimantan. Akan tetapi, tidakkah juga dipertimbangkan oleh elit politik waktu itu (momentum Sumpah Pemuda), apakah hanya karena mereka memiliki akses yang lebih luas (akses politik dan media), sehingga mereka secara sepihak mendaulat bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, daripadaantisipasi jumlah penutur untuk merujuk kepada bahasa Jawa agar nantinya "bahasa Indonesia" itu lebih berterima. Lalu gambar-gambar 'kepentingan penyatuan bangsa' itu mewakili bagian bangsa yang mana?<sup>6</sup>

Tanpa bermaksud menghilangkan rasa hormat kepada Budi Utomo dkk., yang menjadikan alasan persatuan bangsa sebagai dalih menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional untuk melawan bahasa kolonial, bahasa Melayu yang saat itu dijadikan bahasa Nasional juga sarat dengan kontroversi dikotomis. Ada dua kontroversi dikotomis yang terbetik dari sejarah yaitu--- dikotomi nasional-kolonial dan yang kedua dikotomi Melayu Tinggi-Melayu rendah.

<sup>5</sup>Hilmar Farid, "Menemukan Bangsa, Menciptakan Bahasa: Bahasa, Politik, dan Nasionalisme Indonesia", dalam *Bahasa dan Kekuasaan- Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, ed. Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (Bandung: Mizan, 1996) hlm. 117.

<sup>6</sup>Ibid. Pada saat itu, Sumpah Pemuda hanya diliput oleh surat kabar nasional yang jumlah oplah dan pembacanya sangat terbatas.

Apa yang secara resmi kala itu dan kini disebut bahasa Indonesia atau bahasa nasional, ternyata merupakan hasil karya pemerintah kolonial. Pada tahun 1901, dengan dikomando oleh Charles Adrian van Ophuijsen<sup>7</sup> bahasa Indonesia diciptakan. Fakta sejarah lain menunjukkan bahwa van Ophuijsen waktu itu bekerjasama dengan Balai Pustaka bentukan pemerintah Hindia Belanda untuk merencanakan/merekayasa bahasa Melayu Tinggi sebagai bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia bertitik tolak dari semangat nasional tetapi bernafaskan kolonial. Lalu, di sisi mana dikotomi terjadi?

Dikotomi yang kedua yaitu pemilihan bahasa Melayu Tinggi sebagai bahasa Melayu yang dijadikan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu Rendah. Bahasa Melayu Tinggi dari sisi struktur internal bahasa (morfologis dan sintaksis) dikendalikan oleh pemerintah penjajah melalui van Ophuijsen dan Balai Pustakanya. Sementara, bahasa Melayu Rendah yang lebih banyak dipakai oleh masyarakat kebanyakan (media pergerakan dan pedagang) dianggap sebagai bahasa pasaran atau kampung yang tidak layak untuk distandarkan.<sup>8</sup> Namun dalam perkembangannya justru bahasa Melayu Rendah yang tumbuh dengan cepat, karena bahasa ini dengan bebas diujarkan oleh banyak kelompok, tidak hanya dari kalangan pergerakan, namun juga dari kalangan rakyat jelata.

Dari paparan di atas tidak salah kalau memang dipertanyakan proses keabsahan

bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia yang seolah membenarkan adagium bahwa bahasa tidak pernah lepas dari politik. Refleksinya adalah mengingat proses yang sangat kental dengan aroma politis, berupa haruskah ada rekonstruksi penamaan 'bahasa resmi' terhadap bahasa Indonesia, atau bahkan rekonstruksi terhadap labelnya sebagai 'bahasa Nasional'. Gagasan itu memang terlalu dini menyeruak apalagi kalau melihat fakta linguistik berikut ini.

Secara struktur memang bahasa Melayu memiliki tata bahasa yang lebih egaliter dibandingkan dengan bahasa daerah lainnya khususnya dengan bahasa Jawa, yang hegemonik dari segi kuantitas penutur.<sup>9</sup> Bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa nasional karena bahasa ini dianggap memiliki sistem stratifikasi bahasa yang kompleks.<sup>10</sup> Memang contoh yang disuguhkan dalam setiap literatur linguistik adalah contoh yang hanya ditulis oleh Geertz, yaitu Kromo, Madyo dan Ngoko.<sup>11</sup>

Akan tetapi dalam perkembangannya, bahasa Indonesia yang di awal sejarah dibela karena sifat egaliternya menjadi tidak berdaya terhadap romantisme kramanisasi ala Jawa. Pada masa, era orde baru aksi kramanisasi ini mengalami *golden age*-nya. Pada masa ini, bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, namun juga menjadi 'alat' kekuasaan. Istilah bahasa *politesse* hinggap pada semua ruang kehidupan publik, *tunawisma*, *pramu saji*, *swasembada*, *binaraga*, *diamankan*, *dimintai keterangan* adalah sebagian kecil contoh yang pada tataran realitas kadang datang dengan bentuk

<sup>7</sup>Ariel Heryanto, "Pembakuan Bahasa dan Totalitarianisme", dalam *Bahasa dan Kekuasaan- Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, ed.Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (Bandung: Mizan, 1996) hlm. 255-256.

<sup>8</sup>Fenomena tentang kontrol terhadap bahasa oleh media dan rezim pemerintahan sudah menjadi kajian tersendiri dalam studi analisis wacana. Baca Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara: 2006), hlm. 15, 133-167, 171-191.

<sup>9</sup>Mochtar Pabotinggi, "Bahasa, Kramanisasi dan Kerakyatan", dalam *Bahasa dan Kekuasaan- Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, ed.Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (Bandung: Mizan, 1996) hlm. 163-164

<sup>10</sup>Lihat Janet Homes, *An Introduction.....*

<sup>11</sup>Cliffort Geertz, *The Religion of Java*, (Illinois: The Free Press of Glencoe), hlm. 135

lembut, namun sering kali bahasa *politesse* itu menjelma dalam bentuk yang mengerikan karena sudah jauh meninggalkan raga semantiknya. *Language game* yang diperagakan oleh orde baru bukannya mengalir alami tanpa rekayasa kreasi. P3B (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) adalah lembaga yang menjadi otak dan 'Polkam' nya,<sup>12</sup> sehingga bahasa Indonesia kala itu "berkerangka Melayu" dan "berdaging Jawa".

Dari sketsa proses pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang diwarnai muatan politis, bukan tidak mungkin akan memberi celah bagi bahasa daerah lainnya untuk menjadi bahasa resmi regional, meskipun bukan dengan alasan politis tetapi dengan alasan teknis linguistik yang akan dideskripsikan pada bagian lain tulisan ini.

### Potensi Bahasa Madura Menjadi Bahasa Resmi Regional

Sebelum membahas probabilitas peluang bahasa Madura menjadi bahasa resmi, ada baiknya kalau pembaca diingatkan tentang konsep bahasa resmi, bahasa nasional, bahasa daerah, bahasa pertama dan bahasa kedua. Secara konseptual, istilah-istilah itu perlu dibedakan karena acap kali ditumpangtindihkan satu sama lain. Selain itu, konsep tersebut penting juga dijelaskan dalam rangka mengkalkulasi bahasa Madura menjadi bahasa resmi regional.

Bahasa Resmi adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi, baik lisan ataupun tertulis seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat resmi dan lain-lain.<sup>13</sup> Tidak jauh beda dengan Kridalaksana, Holmes memberikan definisi

yang kurang lebih sama, yaitu "*An Official language is simply language which may be used for government business.*"<sup>14</sup>

Bahasa Nasional acap kali dipertentangkan dengan istilah bahasa Daerah. Istilah pertama diartikan sebagai bahasa yang menjadi bahasa standar atau *lingua franca* di negeri yang multilingual, karena perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa atau ketetapan undang-undang,<sup>15</sup> atau dalam definisi Holmes disebut sebagai "*the language of a political, cultural and social unit.*"<sup>16</sup> Istilah kedua, (bahasa daerah) (*vernacular*) adalah bahasa yang dipergunakan penduduk asli suatu daerah, biasanya dalam wilayah yang multilingual.<sup>17</sup>

Dalam teori pemerolehan bahasa, penting dijelaskan perbedaan antara bahasa kedua dan bahasa asing. Bahasa kedua lebih diartikan sebagai bahasa yang dikuasai oleh seorang penutur bersamaan dengan bahasa Ibu di awal masa hidupnya dan secara sosiokultural, dianggap sebagai bahasa sendiri. Sedangkan bahasa Asing adalah bahasa yang diperoleh melalui pendidikan formal dan tidak memainkan peranan penting dalam komunitas bahasa itu.<sup>18</sup> Definisi-definisi tadi diharapkan bisa menjadi acuan dalam pembahasan selanjutnya tentang potensi bahasa Madura untuk menjadi bahasa resmi regional dan untuk menghindari kesalahpahaman antara pembaca dengan penulis mengenai perbedaan istilah-istilah di atas.

Gagasan penulis untuk menjadikan bahasa Madura sebagai bahasa resmi regional berlandaskan pada modalitas berikut ini: 1) modalitas pemertahanan bahasa, 2) modalitas jumlah penutur bahasa

<sup>12</sup>Baca Ariel Heryanto. Hlm. 252.

<sup>13</sup>Harimurti Kridalaksana, *Kamus Linguistik*. (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm.25

<sup>14</sup>Lihat Holmes, *An Introduction.....*, hlm. 97

<sup>15</sup>Kridalaksana, hlm. 24

<sup>16</sup>Holmes, hlm. 97

<sup>17</sup>Kridalaksana, hlm. 22

<sup>18</sup>Rod Ellis, *The Study of Second Language Acquisition*, (Oxford: Oxford University Press, 1994). Hlm. 11-12.

Madura dan kekerabatannya dengan bahasa lain, 3) modalitas sistem tulis bahasa Madura, 4) modalitas dukungan budaya dan media dan 5) modalitas pengalaman bahasa-bahasa di dunia.

*Pertama*, modalitas pemertahanan bahasa. Semua bahasa daerah yang ada di Indonesia saat ini sedang dalam posisi bertahan (*defence position*), atau bertahan untuk tidak mati (*language death*). Sebuah proses pemertahanan bahasa pasti diawali dengan proses pergeseran (*language shift*). Bahasa daerah, seperti Jawa, Sunda, Batak dan Madura memang harus berjibaku agar bisa tetap *survive*. Serangan budaya dan bahasa dari dalam (bahasa Indonesia) maupun dari luar (bahasa Asing), *alih-alih* untuk berkembang, serangan telah memaksa bahasa-bahasa itu untuk bertahan ke sudut ruang yang tak terbatas.

Seperti yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan, pemilihan bahasa nasional oleh suatu pemerintahan negara aneka bahasa, pasti akan menindas eksistensi bahasa daerah yang tidak terpilih. Dalam konteks ini, proses pergeseran lebih diakibatkan oleh pengaruh politik daripada pengaruh internal struktur bahasa itu. Bahasa nasional diakui atau tidak telah memaksa penduduknya untuk menjadi dwi-penutur, yang mengakibatkan salah satunya harus 'mengalah' untuk mengalami pergeseran. Dalam konteks bahasa Indonesia vs bahasa Madura, kecenderungan bahasa Maduralah yang bergeser semakin jelas dari beberapa indikator berikut: 1) dalam konteks keluarga, banyak keluarga muda yang mengajarkan cara komunikasi anak-anaknya dengan memakai bahasa Indonesia daripada bahasa Madura, padahal keluarga itu berasal dan lahir di Madura, 2) pemakaian teknologi, penggunaan layanan pesan pendek (*short message service*) di kalangan pemakai etnis Madura lebih

banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa mereka sendiri, dan 3) indikator budaya. Hasrat untuk meniru atau menjadi bagian etnis atau kelompok budaya tertentu menyebabkan lahir *bilingualism*. Ancaman budaya asing dalam pergeseran bahasa sudah berlaku inheren, karena masyarakat kita ini terbuka dengan kebudayaan lain, baik yang mendatangi kita ataupun yang kita datangi.<sup>19</sup>

Berbicara tentang ikhtiar pemertahanan bahasa dari pengaruh budaya, sungguh tidak hanya perlu dilakukan oleh bahasa daerah saja, tetapi urgen juga untuk dilakukan oleh bahasa Indonesia sendiri yang sebelumnya sudah dianggap sebagai kampiun untuk merebut hati penutur bahasa daerah. Invasi bahasa asing dengan misi westernisasi pandangan dan nilai<sup>20</sup> menjadi momok yang menakutkan bagi bahasa-bahasa di tanah air. Model invasi ini banyak kita jumpai di media massa, produk MTV, *reality show*, *mini series* bahkan infotainment pun telah mengubah cara pandang masyarakat kita. Agen 'perubahan' itu bisa datang dari kehidupan fiktif karakter tertentu pada sebuah film atau sinetron, produk iklan atau bahkan datang dari karakter atau figur asli seorang artis. Perubahan dapat terjadi dalam cara pandang terhadap gaya berbusana, bergaul dan berbicara. Seorang artis misalnya, ketika sedang diwawancara sibuk melakukan rekayasa campur kode (*code*

<sup>19</sup>Sapardi Djoko Damono, "Kebudayaan Massa dalam Kebudayaan Indonesia: Sebuah Catatan Kecil", dalam *Lifestyle Ecstasy, Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*, ed. Idi Subandy Ibrahim (Yogyakarta: Jalasutra, 1996), hlm. 4.

<sup>20</sup>Jalaluddin Rakhmat, "Generasi Muda di Tengah Arus Perkembangan Informasi", dalam *Lifestyle Ecstasy, Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*, ed. Idi Subandy Ibrahim (Yogyakarta: Jalasutra, 1996), hlm. 200-201.

*mixing*).<sup>21</sup> Berikut contoh gaya bicara seorang aktris film dalam merekayasa campur kode "sebagai seorang *entertainer* saya harus bisa tampil *excellent, but anyway* itu saya akui sangat *difficult* untuk dilakukan." Contoh ujaran itu disamping tidak baku secara morfologis dan sintaksis, juga syarat dengan pengaruh bahasa Inggris yang dipaksakan agar sang aktris terlihat terdidik dan gaul.

Adanya gangguan stabilitas pemertahanan bahasa seperti yang digambarkan di atas, sudah tentu akan membuat bahasa-bahasa daerah -khususnya bahasa Madura-memperkuat daya tawar politisnya agar tidak tergerus, salah satunya dengan proses 'elitisasi'<sup>22</sup> bahasa melalui jalur legal-formal bahasa resmi.

Modalitas *kedua* yaitu jumlah penutur bahasa Madura dan kekerabatannya dengan bahasa lain. Jumlah penutur bahasa Madura dari masa ke masa mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Crystal mencatat bahwa pada tahun 1997 jumlah penutur bahasa Madura kurang lebih sepuluh juta penutur,<sup>23</sup> tapi pada tahun 2000 jumlah penutur ini bertambah sekitar tiga juta sehingga di tahun ini jumlah penutur bahasa Madura menjadi tiga belas juta penutur.<sup>24</sup> Modalitas ini paling tidak akan sangat berharga dalam merencanakan bahasa Madura sebagai bahasa resmi, yang salah satu syaratnya adalah keberterimaan (*acceptance*).

<sup>21</sup>Campur Kode (*Code Mixing*) adalah proses pentransferan elemen linguistik dari bahasa yang satu ke bahasa lainnya. Lihat David Crystal, *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*, (Cambridge: Basil Blackwell, 1991), hlm. 59.

<sup>22</sup>Meminjam istilah Kuntowijoyo, kata elitisasi identik dengan perpindahan (mobilitas) dari posisi bawah (remeh) ke posisi atas (elit). Baca Kuntowijoyo, "Budaya Elit dan Budaya Massa", dalam *Lifestyle Ecstasy, Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*, ed. Idi Subandy Ibrahim (Yogyakarta: Jalasutra, 1996) hlm. 8-9.

<sup>23</sup>Lihat David Crystal, *The Cambridge Encyclopedia Language*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), hlm. 440.

<sup>24</sup>Purwo, B.K., *Bangkitnya Kebhinekaan Dunia Linguistik dan Pendidikan*. (Jakarta: Mega Media Abadi, 2000) hlm. 8

Dalam perspektif kekerabatan dengan bahasa lain, kekerabatan bahasa Madura lebih dekat dengan bahasa Melayu dibanding dengan bahasa tetangganya yaitu bahasa Jawa<sup>25</sup>. Lihat table 1 berikut:

NO	KELOMPOK BAHASA	PERSENTASE KEKERABATAN
1	Sunda-Jawa	33%
2	Sunda-Melayu	37%
3	Sunda-Madura	36%
4	Jawa-Melayu	33%
5	Jawa-Madura	37%
6	Melayu-Madura	47%

Tabel menunjukkan bahwa kekerabatan bahasa Madura terhadap bahasa Melayu mencapai 47%. Ini berarti bahwa kekerabatan kedua bahasa itu lebih tinggi 10% dari pada kekerabatan bahasa Madura dengan bahasa lainnya. Fakta tersebut semakin memperkuat niat dan membulatkan ikhtiar untuk menjadikan bahasa Madura sebagai bahasa resmi regional, karena sudah tidak ada lagi beban psikologis antara bahasa Madura dengan bahasa Indonesia.

Temuan penelitian lain yang mendukung proses elitisasi ini yaitu fakta kekerabatan kata dasar rumpun bahasa Sumatera-Jawa-Madura. Bukti linguistik dengan teknik yang sama, yaitu leksikostatistik dilakukan oleh Bernd Nothofer.<sup>26</sup> Baca Tabel 2 di bawah ini:

	Sunda	Jawa	Melayu	Madura
Sunda	-	33	37	36
Jawa		-	33	37
Melayu	40	37	-	
Madura	40	40	53	-

<sup>25</sup>Hasil penelitian Isiro Dyen---seorang pakar linguistik historis yang menerapkan teknik leksikostatistik, dalam Jos Daniel Parera, *Kajian Linguistik Umum Historis Komparatif dan Tipologi Struktural*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991). Hlm. 134-135

<sup>26</sup>Penelitian Bernd Nothofer dalam Jos Daniel Parera, *Kajian Linguistik Umum Historis Komparatif dan Tipologi Struktural*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), Hlm. 110-111.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa dari 200 kata dasar, 53 kata dasar dalam bahasa Madura lebih dekat dengan bahasa Melayu dibanding dengan kedekatannya dengan bahasa daerah lain.

*Ketiga*, adalah modalitas sistem tulis bahasa Madura. Salah satu ciri bahasa bermartabat menurut Soepomo adalah, bahwa bahasa itu harus memiliki sistem tulis. Sistem tulis diperlukan untuk mencatat rekaman sejarah wilayah itu dan kejadian-kejadian penting lainnya. Sistem tulis itu tidak harus asli dari bahasa tersebut, tetapi bisa dipinjamkan dari bahasa lain.<sup>27</sup> Dalam hal sistem tulis, pada zaman awal telah ditemukan prasasti di Madura dengan beraksara Pallawa, serta menggunakan bahasa Sansakerta dan Jawa Kuno. Pemakaian bahasa Arab dengan ekspresi gagasan Madura bisa dijumpai di tanah pesantren dan saat ini, telah digunakan huruf latin dalam bahasa Madura.<sup>28</sup>

Modalitas *keempat*, yaitu dukungan budaya dan media massa. Bahasa adalah produk budaya.<sup>29</sup> Begitu juga bahasa Madura, yang lahir dari rahim budaya Madura yang 'keras'. Kata keras kadang cukup stigmatis. Kata ini kerap mengganggu kenyamanan interaksi budaya Madura dengan budaya lainnya. Namun bukan tidak mungkin, kalau kata keras ini mengalami pelurusan makna, sehingga lebih berarti *tegas*, *dinamis* dan *lugas* yang akan memberi dampak konfidensi yang tinggi bagi perkembangan bahasa Madura menuju bahasa resmi regional.

*Back-up* media sangat dibutuhkan dalam usaha menjadikan bahasa Madura sebagai bahasa resmi regional. Dengan

media, bisa dibuktikan bahwa bahasa Madura itu eksis, baik dari perspektif sistem tulisnya ataupun dari kerangka tindak tuturnya. Media yang dimaksud adalah media yang memuat tulisan, kebudayaan, kesenian, kesusasteraan yang berpengantar bahasa Madura. Sebagian tugas ini telah dilakukan oleh beberapa televisi, surat kabar dan buletin lokal, namun masih diperlukan penguatan-penguatan dari pihak lain yang berminat di sektor media.

*Kelima*, modalitas pengalaman bahasa-bahasa dunia. Dalam usaha menjadi bahasa resmi regional, bahasa Madura bukanlah yang pertama. Belajar dari pengalaman bangsa India, negeri ini memiliki empat belas bahasa resmi regional selain bahasa Hindi dan Inggris.<sup>30</sup> Untuk lebih lengkapnya, cermati Tabel 3 berikut:

Negara	Bahasa Resmi
Belgia	Belanda, Prancis
Canada	Inggris, Prancis
Finlandia	Suomi, Swensk
Kenya	Swahili, Inggris
Selandia Baru	Maori, Inggris
Pilipina	Pilipino, Inggris

Pemilihan lebih dari satu bahasa resmi (bedakan dengan bahasa nasional) oleh sebuah negara atau pemerintahan biasanya didasari pada faktor keanekaragaman negara itu dan kekerabatan dengan bahasa yang diangkat pada posisi sangat dekat (satu rumpun). Dalam kasus pentasbihan bahasa Maori sebagai bahasa resmi kedua di Selandia Baru, yang sebelumnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi pemerintah dan pendidikan. Tetapi, karena perjuangan yang gigih dengan menjadikan Maori sebagai bahasa asli negeri itu sebagai alasan, akhirnya pada 1987 bahasa Maori dijadikan bahasa resmi Selandia Baru, selain bahasa Inggris. Ini berarti, bahwa bahasa ini bisa

<sup>27</sup>Soepomo Poedjosoedarmo, *Filsafat Bahasa*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 40-41.

<sup>28</sup>Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2007). Hlm. 51

<sup>29</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 2

<sup>30</sup>Lihat Holmes, hlm. 116.

dipakai dalam acara-acara resmi pemerintahan, persidangan, transaksi dan tentu saja dalam pengantar pendidikan.

### Perencanaan Bahasa Madura sebagai Bahasa Resmi Regional<sup>31</sup>

Jika modalitas untuk menjadikan bahasa Madura sebagai bahasa resmi regional telah dimiliki, maka langkah selanjutnya adalah memakai modalitas tersebut untuk persiapan dan perencanaannya. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diliput dalam perencanaan bahasa, yaitu seleksi dan keberterimaan (kebijakan sosial-politik), elaborasi dan kodifikasi (kebijakan linguistik).<sup>32</sup>

Proses menjadikan bahasa Madura sebagai bahasa resmi regional harus diawali dengan langkah sosial politik, yaitu pemilihan salah satu dialek dan aksen (DA) resmi dari empat macam dialek dan aksen yang eksis di Madura yaitu---DA Bangkalan, DA Sampang, DA Pamekasan dan DA Sumenep. Seleksi ini harus mempertimbangkan faktor lain. yaitu keberterimaan. Jadi, jangan sampai proses seleksi ini menimbulkan kontroversi yang berujung pada perpecahan. Namun, karena DA Madura tidak seberapa kompleks dari sisi linguistik (tingkat kekerabatannya masih sangat tinggi), maka keempat DA itu masih bisa berdialog dan bernegosiasi dalam ruang kodifikasi dan elaborasi.

Perangkat elemen yang harus dibuat dalam proses kodifikasi dan elaborasi adalah ketersediaan, yang berupa 1) tata ejaan normative (*normative ortography*) 2)

penyusunan tata bahasa (*grammar*) dan 3) kamus (*dictionary*).<sup>33</sup> Dalam konteks bahasa Madura, ketiga elemen tersebut harus representatif terhadap DA yang beredar di Madura. Selama ini, tata ejaan sering menjadi masalah pelik dalam penyatuan sistem tulis dan sistem ucap bahasa Madura, sehingga keempat penutur DA selalu merasa bahwa merekalah yang paling benar dan asli (*indigineous*). Padahal kenyataannya, setiap bahasa itu berpotensi memiliki beragam DA, meskipun satu *isogloss*. Hendaknya, faktor ini jangan terlalu ditonjolkan karena bisa diatasi dengan diterimanya keempat DA itu sebagai bahasa standar Madura, seperti yang terjadi dalam kasus bahasa Inggris, yaitu keberterimaan Bahasa Inggris Amerika (*American English*) dan Bahasa Inggris Britania (*British English*) sebagai *Received Pronunciation*.

Perencanaan ini tentu saja harus melibatkan banyak pihak agar kelak usaha menjadikan bahasa Madura sebagai bahasa Resmi Regional dapat diterima oleh semua kalangan. *Language planning* ini harus menjadi tanggung jawab empat komponen, yaitu para ahli bahasa, pemerintah, guru bahasa dan masyarakat penutur asli bahasa Madura.

### Penutup

Ikhtiar menjadikan bahasa Madura sebagai bahasa resmi regional, bukan merupakan sebuah proyek ambisius, atau bahkan obsesi egois bumiputera. Rencana ini bukan juga untuk mendongkel sebuah kemapanan elit yang nantinya akan memporak-porandakan tatanan undang-undang yang sudah nyaman ada di masyarakat. Usaha ini lebih bermakna *power sharing* (bahasa Indonesia dengan bahasa daerah) dengan berlandaskan pada pentingnya sebuah aset bahasa besar, yakni

<sup>31</sup>Istilah perencanaan bahasa (*language planning*) dalam sosiolinguistik sering disandingkan dengan istilah rekayasa bahasa (*language engineering*). Keduanya dipakai untuk menyiapkan bahasa tertentu menjadi bahasa nasional, bahasa resmi atau bahasa negara sebuah negeri aneka-bahasa. Baca Sumarsono, hlm. 371-399

<sup>32</sup>Lihat Holmes, hlm. 102.

<sup>33</sup>Sumarsono, hlm. 378

bahasa Madura, untuk dipertahankan dan dirawat. Paparan ini merupakan tawaran alternatif untuk terus-menerus menghidup-hidupkan bahasa Madura, di mana kalau tidak dilakukan akan membuat bahasa ini lambat laun meninggalkan suasana riuh rendah dunia linguistika dan akan mulai menuju titik senyap kematian bahasa.

Kalaupun keinginan ini ditiru oleh bahasa daerah di tempat lain, tentu saja

tidak akan membawa bahasa Indonesia pada domain keterasingan justru akan mampu menambah khazanah linguistika Indonesia yang beragam dan mampu melahirkan semangat nasionalisme baru, bukan nasionalisme Madura, nasionalisme Jawa atau bukan nasionalisme partikular lainnya, tetapi nasionalisme Indonesia Raya tercinta

*Wa Allāh a'lam bi al-sawāb* □

